

KONSTRUKSI REALITAS DAN AGENDA MEDIA
(Analisis *Framing* Pemberitaan Larangan Keraton Yogyakarta terhadap
***Muslim United* di Media Online Republika Online Dan Detik.com Periode 1-13**
Oktober 2019)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Stata 1

Disusun oleh:

DETA JAUDA NAJMAH
NIM 16210078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dosen Pembimbing:
Dr. H. M. Kholili, M.Si
NIP 19590408 198503 1 005

PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-197/Un.02/DD/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONTRUKSI REALITAS DAN AGENDA MEDIA (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Keraton Yogyakarta Terhadap muslim United di Media Online Republika online Dan Detik.com Periode 1 - 13 Oktober 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DETA JAUDA NAJMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16210078
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Januari 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Kholili, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60137ca6c3f7b



Penguji I

Drs. Mukhammad Sahlan, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 601038e8a236f



Penguji II

Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 600e51523f91e



Yogyakarta, 21 Januari 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 60137de82ae14



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamuallaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Deta Jauda Najmah
NIM : 16210078
Judul Skripsi : **KONSTRUKSI REALITAS DAN AGENDA MEDIA (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Keraton Yogyakarta terhadap Muslim United di Media Online Republika Online Dan Detik.com Periode 1-13 Oktober 2019).**

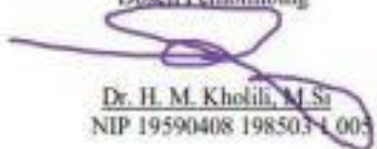
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

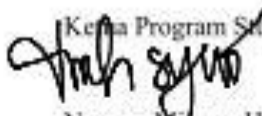
Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuallaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Mengetahui,
Dosen Pembimbing


Dr. H. M. Kholili, M.Si
NIP 19590408 198503 1 005

Kepala Program Studi

Nanang Nurwar Hasyim
NIP. 19840307 201101 1 013

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya yang bertanda tangah di bawah ini :

Nama : Deta Jauda Najmah
NIM : 16210078
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa saya memakai jilbab dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta tidak akan menuntut kepada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta apabila suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah karena penggunaan jilbab. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Deta Jauda Najmah
NIM.16210078

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deta Jauda Najmah
NIM : 16210078
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

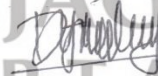
Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**KONSTRUKSI REALITAS DAN AGENDA MEDIA (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Keraton Yogyakarta terhadap Muslim United di Media Online Republika Online Dan Detik.com Periode 1-13 Oktober 2019)**" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis siap untuk mempertanggung jawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 15 Desember 2020

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan



Deta Jauda N

NIM.16210078



MOTTO

“SELALU LEBIH BANYAK HAL YANG PATUT UNTUK DISYUKURI”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nanang Mizwar Hasyim, S.Sos, M.Sselaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Muhammad Sahlan, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa.
5. Dr. H. M. Kholili, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran disela-sela kesibukannya Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen-dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.

8. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “*KONSTRUKSI REALITAS DAN AGENDA MEDIA (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Keraton Yogyakarta terhadap Muslim United di Media Online Republika Online Dan Detik.com Periode 1-13 Oktober 2019)*” ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik. Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Deta Jauda Najmah (2021). 16210078. *Konstruksi Realitas Dan Agenda Media (Analisis Framing Pemberitaan Larangan Keraton Yogyakarta terhadap Muslim United di Media Online Republika Online Dan Detik.com Periode 1-13 Oktober 2019)*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pembimbing: Dr. H. M. Kholili, M.Si

Keraton Yogyakarta menolak surat permohonan izin acara *Muslim United* yang diinisiasi oleh Forum Ukhuwah Islamiyah Yogyakarta untuk menggunakan Masjid Gedhe Kauman sebagai tempat acara. Larangan dari Keraton terhadap *Muslim United* ini sempat viral di media sosial, serta tak luput diberitakan oleh Republika Online dan Detik.com. Menurut paradigma konstruksionis, setiap media memiliki ideologinya masing-masing sehingga berdampak pada penentuan berita. Satu peristiwa yang sama, bisa jadi memiliki sudut pandang berbeda dan mempengaruhi khalayak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah menjawab rumusan masalah yakni bagaimana pembingkaiian yang dilakukan media online Republika Online dan Derik.com terkait peristiwa larangan Keraton terhadap *Muslim United*. Teori *Framing* yang digunakan adalah teori model Robert N. Entman yang menjelaskan *Define Problem* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan masalah), *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral) dan *Treatment Recommendation* (memberikan rekomendasi/penyelesaian).

Dari hasil analisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan antara lain Republika Online melihat bahwa penyebab masalah ini karena tidak adanya komunikasi berkelanjutan antara pihak Keraton dan panitia *Muslim United*. Namun Republika Online juga menunjukkan banyak klaim moral bahwa acara *Muslim United* merupakan acara keagamaan yang harus didukung dan dilindungi kemananannya. Sementara Detik.com melihat bahwa *Muslim United* terkesan tidak patuh terhadap keputusan Keraton yang merupakan pemilik Masjid Gedhe Kauman. Detik.com juga memberikan penyelesaian agar *Muslim United* pindah dan mencari tempat lain.

Kata Kunci : *Framing*, Keraton, *Muslim United*, Detik.com, Republika Online

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.	24

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Berita Larangan Keraton Yogyakarta Terhadap <i>Muslim United</i>	27
B. Profil Media Online Republika Online.	28
C. Profil Media Online Detik.com.....	31

BAB III PEMBAHASAN

A. Analisis <i>Framing</i> Berita Larangan Keraton terhadap <i>Muslim United</i> di Republika Online dan Detik.com.....	33
B. Perbandingan <i>Framing</i> antara Republika Online dan Detik.com.....	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	77
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Model <i>Framing</i> Robert N. Entman.....	17
Tabel 2 Berita Republika Online dan Detik.com periode 1-13 Oktober 2019.....	20
Tabel 3: Daftar Berita Republika Online	23
Tabel 4: Daftar Berita Detik.com.....	23
Tabel 5: Isi Berita Republika Online	34
Tabel 6: Isi Berita Detik.com.....	36
Tabel 7: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Republika Online “Keraton Tolak Pinjamkan Areanya kepada Panitia <i>Muslim United</i> ”	40
Tabel 8: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Detik.com “Alasan Keraton Yogya Larang <i>Muslim United</i> ”	42
Tabel 9: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Republika Online “Ditolak Keraton Yogyakarta, <i>Muslim United</i> Tetap Berjalan.”	45
Tabel 10: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Republika Online “ <i>Muslim United</i> Tetap Berjalan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab.”	48
Tabel 11: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Detik.com "Jika <i>Muslim United</i> Tetap Gelar Acara di Masjid Gedhe, Sultan: Urusan Polisi"	50
Tabel 12: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Detik.com " <i>Muslim United</i> Tetap Digelar di Masjid Gedhe, Panitia: Diakomodir Takmir."	52

Tabel 13: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Republika Online “ <i>Muslim United</i> Dilarang Keraton, Haedar: Kami Menghargai.”	55
Tabel 14: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Detik.com “Acara <i>Muslim United</i> Tak Berizin, Ini Penjelasan FUI”	58
Tabel 15: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita Republika Online “Acara <i>Muslim United</i> Pindah, Panitia: Demi Kebaikan Bersama.”	61
Tabel 16: Analisis <i>Framing</i> Robert Entman pada Berita “Tak Izinkan di Kauman, Acara <i>Muslim United</i> Dipindah ke Jogokariyan”	63
Tabel 17: Perbandingan <i>Framing</i> Republika Online dan Detik.com.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki berbagai julukan yang melekat di masyarakat. Tidak hanya sebagai Kota Pelajar dan Kota Budaya, Yogyakarta juga mendapat gelar *Jogja City of Tolerance*. Gelar ini merupakan harapan sekaligus bentuk penghargaan kepada Yogyakarta yang telah menangani banyak kasus intoleransi dengan akhir yang baik.

Hingga pada bulan Oktober 2019 lalu, muncul pemberitaan tentang larangan Keraton terhadap *Muslim United*. Peristiwa ini berawal dari permintaan izin panitia acara *Muslim United* yang berencana menggunakan Masjid Gede Kauman selama 3 hari yakni pada tanggal 11-13 Oktober 2019. Bertajuk “Sedulur Saklawase”, acara *Muslim United* ini, mendatangkan sejumlah da’i seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Attaki, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Felix Siau.

Muslim United merupakan bentuk program yang diinisiasi oleh Forum Ukhuwah Islamiyah Yogyakarta bersama para elemen dan ormas Islam lainnya. Bentuk dari kegiatan ini adalah kajian Islam yang menghadirkan ustadz-ustadz, tokoh agama dari berbagai harokah, dan artis-artis yang telah berhijrah. Sejak dirilis pada

2018 lalu, *Muslim United* rencananya akan menjadi agenda tahunan yang bertujuan untuk merekatkan persaudaraan sesama muslim.¹

Permohonan izin dari panitia *Muslim United* pun mendapatkan balasan surat dari Keraton. Dalam surat tersebut tertulis pernyataan bahwa “*Belum dapat mengabulkan permohonan menggunakan Masjid Gedhe Keraton serta halaman, Ndalem Pengulon, dan Alun-Alun Utara sisi barat.*” Keputusan ini pun memunculkan berbagai polemik dan menjadi perbincangan yang hangat ditengah masyarakat. .

Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam hal otonomi daerahnya. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalankan sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang Sultan. Oleh sebab itu, kekuasaan atas pemerintah dipegang penuh oleh Sultan. Selain itu, Sultan juga berhak atas bangunan di kawasan Keraton dan tanah-tanah yang berada pada area *Sultan Ground*. Maka secara kepemilikan, Sultan berhak menentukan pihak mana yang boleh atau tidak boleh menggunakan area miliknya.

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 menyatakan: “Tanah Kasultanan adalah tanah hak milik Kasultanan yang meliputi Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY.” Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 7 Perdais yang menyebutkan bahwa Tanah Keprabon sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya.

¹ <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/10/11/pz71uo291-muslim-united-tetap-berjalan-sebagai-bentuk-tanggung-jawab> Diakses pada 12 Desember 2019 pukul 15.00

Diantaranya ada Keraton, Alun -Alun Lor, Alun-Alun Kidul, Benteng, Jagang, Panggung Krapyak, Tugu Pal Putih, Tamansari, Pasar Beringharjo, Kepatihan, Pasareten Imogiri Ngayogyakarta, Makam Sultan Agung Ngayogyakarta, Makam Kutho Gedhe Ngayogyakarta, sarta Hasterenggo, Pasareyan Giring, Makam Giriloyo, Makam Wot Galeh, Makam Pakuncen, Makam Banyu Sumurup, Makam Gunung Buthak, Makam Widoro Manis, Petilasan Petilasan, Pasangrahan-Pasangrahan, dan Masjid-Masjid Kagungan Dalem.²

Di sisi lain, keputusan Keraton melarang acara *Muslim United* ternyata juga membuat sebagian masyarakat merasa kecewa. Mereka menilai bahwa hal ini bisa merusak citra Yogyakarta sebagai *City of Tolerance*. Pihak masyarakat muslim yang antusias ingin mengikuti acara *Muslim United* juga menyayangkan keputusan tersebut. Mereka menganggap bahwa Masjid adalah Rumah Allah, sehingga tidak salah jika kegiatan dakwah dilaksanakan pada Masjid mana saja, termasuk Masjid Gede Kauman.

Peristiwa tersebut dikategorikan sebagai isu agama yang terjadi ditengah masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ada enam agama yang diakui oleh Negara Indonesia, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Dari keenam agama tersebut, mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu agama inilah yang kemudian menjadi topik menarik dan diangkat menjadi berita. Isu agama yang diartikan disini bukan berarti media yang memaparkan ajaran-ajaran suatu agama, melainkan lebih menyangkut pada seluruh aspek kehidupan beragama beserta segala kompleksitas yang menyertainya. Karena itulah, peristiwa larangan Keraton terhadap acara *Muslim United* ini turut disoroti oleh sejumlah media massa di Indonesia. Beberapa diantara media yang memberitakan peristiwa tersebut adalah media online Republika Online dan Detik.com.

Kedua media ini memiliki tingkat ekspos yang tinggi jika dibandingkan dengan media lainnya. Baik media online Republika Online dan Detik.com juga sama-sama memberitakan peristiwa tersebut secara berkala. Selama rentang waktu sejak 1-13 Oktober 2019, Republika Online telah mengunggah sebanyak 11 artikel sedangkan Detik.com sebanyak 13 artikel.

Setiap media memiliki ideologinya masing-masing. Hal ini juga berdampak pada penentuan berita. Berita yang ditampilkan bisa menjadi bias karena dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Menurut paradigma kontruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, nilai-nilai dari wartawan atau media. Dengan demikian, media memiliki kebijakan tersendiri dalam membangun, menciptakan, mengembangkan, dan menyuguhkan berita pada khalayak dengan angle yang berbeda. Sehingga suatu peristiwa yang sama bisa memiliki sudut pandang yang berbeda.³

³ Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS 2002) hlm 79

Republika Online dan Detik.com memiliki ideologi dan latar belakang yang berbeda. Detik.com merupakan portal berita yang diakuisisi oleh CT Crop, perusahaan milik Chairul Tanjung. Detik.com menekankan bahwa medianya menjunjung prinsip *trusted*, *fastest*, dan *leading*. Detik.com berusaha untuk terus menjadi mitra setia masyarakat dalam menghadapi perubahan.⁴

Berbeda dengan Detik.com, media online Republika Online merupakan portal berita yang sering menaruh perhatian lebih pada isu-isu keislaman. Republika memiliki lima visi. Pertama, menegakkan amar maruf nahi munkar. Kedua, membela melindungi, dan melayani kepentingan umat. Ketiga, mengkritisi tanpa menyakiti. Keempat, mencerdaskan, menyelidiki, dan mencerahkan. Kelima, berwawasan kebangsaan.⁵

Dari headline berita yang diunggah oleh Republika Online dan Detik.com, secara sekilas terlihat bahwa kedua media tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat fenomena atas larangan Keraton terhadap *Muslim United*. Salah satu contohnya seperti headline pada media online Republika Online yang memilih judul "*Muslim United Tetap Berjalan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab*". Sedangkan media online Detik.com memilih judul "*Tak Izinkan Acara Muslim United di Masjid Gedhe, Sultan: Kita yang Punya Rumah*".

⁴ Diakses dari <https://m.Detik.com/news/berita/d-3553234/detikcom-19-tahun> pada 12 Desember 2019 pukul 14.35

⁵ Diakses dari <https://Republika Online> pada 12 Desember 2019 pukul 15.00

Asumsi inilah yang membuat media dipandang sebagai agen konstruksi sosial. Sehingga dalam praktiknya, media akan mengkonstruksi realitas melalui *Framing*. Menurut Told Gitlin, *Framing* adalah sebuah strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan diserhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Akibatnya, informasi yang diterima oleh pembaca bisa menjadi bias sesuai dengan bingkai media tersebut.

Sedangkan daalam memproses informasi, seorang muslim dapat berpedoman pada Al Quran surah Al Hujurat ayat 6 .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا

فَعَلْتُمْ لُدْمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Ayat tersebut mengandung pesan untuk senantiasa melakukan *tabayyun* (konfirmasi), yakni pengecekan ulang informasi yang diterima. Jika dikaitkan dengan proses penerimaan informasi saat ini, maka berita dalam suatu media lah yang menjadi aspek penting untuk diteliti atau dicek ulang. Hal ini disebabkan karena media massa merupakan penyedia kebutuhan manusia dalam hal informasi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pembingkaiian yang dilakukan media online Republika Online dan Detik.com terkait kasus larangan Keraton Yogyakarta terhadap *Muslim United*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembingkaiian yang dilakukan media online Republika Online dan Detik.com terkait kasus larangan Keraton Yogyakarta terhadap *Muslim United*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perbingkaiian yang dibuat oleh Republika Online dan Detik.com terkait pemberitaan larangan Keraton terhadap *Muslim United*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keimuan dibidang analisis teks media khususnya analisis *Framing* model Robert Entman. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan baru terkait pemberitaan mengenai larangan Keraton terhadap *Muslim United* dan bisa dijadikan salah satu referensi bagi penelitian serupa selanjutnya.

b. Manfaat Praktis.

Dari sisi pembaca berita, penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada khalayal dalam memahami suatu berita, agar tak hanya melihat dalam satu perspektif media saja. Karena pengemasan suatu berita sudah melalui tahapan

konstruksi. Sementara dari sisi media, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada para praktisi media online, khususnya bagi media online Republika Online dan Detik.com dalam membingkai suatu berita.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Analisis *Framing* terhadap media online telah banyak dilakukan. Demikian pula dengan penelitian yang membahas tentang media online Republika Online dan Detik.com. Fungsi adanya kajian pustaka adalah memastikan agar penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Sehingga tidak terjadi pengulangan atau plagiarisme. Selain itu, kajian pustaka juga bertujuan untuk menjadi pembanding terhadap penelitian yang sudah ada. Dari hasil pencarian, peneliti menemukan banyak penelitian tentang analisis *Framing*. Peneliti meninjau empat artikel yang berkaitan dengan analisis *Framing*, sebagai berikut.

Pertama, artikel berbahasa Indonesia dalam Jurnal Al Khitabah berjudul “Konstruksi Pemberitaan Konflik Etnis Rohingya (Analisis *Framing* Robert Entman pada Harian Sindo Makassar edisi September 2017)” oleh Afifuddin Tike. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Framing* Harian Sindo Makassar dalam memberitakan konflik etnis Rohingya edisi September 2017, melalui pendekatan analisis *Framing* model Robert Entman. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pesan dakwah yang terkandung pada pemberitaan konflik etnis Rohingya di Harian Sindo Makassar edisi September 2017. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis dokumen dan pustaka. Teknik analisis data dilakukan dalam empat tahap

analisis *Framing* Robert Entman, yaitu define problem, diagnose causes, moral evaluation, dan treatment recommendation.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Harian Sindo dalam pemberitaannya cenderung menonjolkan tindakan ekstremisme dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine. Tujuan pembingkaiannya yang dilakukan oleh Harian Sindo adalah untuk mendorong agar masyarakat internasional khususnya masyarakat Indonesia untuk bekerja sama mengatasi krisis kemanusiaan akibat aksi pembersihan etnis yang dilakukan oleh militer Myanmar. Hasil penelitian ini juga mengandung pesan-pesan dakwah, yaitu kepemimpinan harus tegas, adil, dan bijaksana, saling tolong-menolong antar umat bertetangga, dan membela yang Haq dan melawan yang batil (*amar ma'ruf nahi mungkar*).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Farihunnisa, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Analisis *Framing* Pemberitaan Aksi Teror di Islamic Center Of Quebec, Canada Dalam Republika Online dan Detik.com”. Teori *Framing* yang digunakan adalah teori analisis *Framing* Robert N. Entman dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara serta observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Republika online mendefinisikan kasus tersebut sebagai kasus terorisme dan kejahatan berat. Republika online mendefinisikan kasus tersebut adalah kasus ini sebagai bentuk intoleransi yang dapat menyebabkan perpecahan dan mengancam serangan teroris dan bersatu menolak setiap upaya menyebar perpecahan dengan dasar agama. Sedangkan Detik.com mendefinisikan kasus tersebut adalah kasus bentuk

serangan terorisme yang mesti dikutuk dan dikecam. Detik.com merekomendasi pada khalayak agar lebih waspada dengan aksi terorisme yang bisa dilakukan siapa saja, dimanapun, dan kapanpun.

Ketiga, artikel berbahasa Inggris pada *Elon Journal of Undergraduated Reseach in Communications* yang berjudul “*Framing Theory in Newspaper Coverage of the 2015 Greek Referendum*” oleh Filippos Rempoutzakos. Penelitian ini membahas pemberitaan terkait Referendum dua surat kabar besar Yunani, yaitu Kathimerini dan Ta Nae. Referendum ini adalah tentang apakah Yunani akan menerima atau menolak persyaratan Trokia. Pemungutan suara “YA” akan menunjukkan komitmen Yunani terhadap cita-cita Eropa sedangkan suara “TIDAK” akan menunjukkan bahwa Yunani bebas menentukan nasibnya sendiri dan siap menangani krisis yang terjadi.

Penelitian ini menganalisis 14 artikel dari dua surat kabar besar Yunani, yaitu Kathimerini dan Ta Nae terkait Referendum yang diumumkan tersebut. Teori yang digunakan adalah analisis *Framing*. Hasilnya, kedua surat kabar tersebut membingkai berita sesuai dengan kecenderungan politis masing-masing. Kathimerini yang condong ke kanan, membingkai masalah dengan suara “YA”. Sedangkan Ta Nea yang condong ke kiri, menggunakan suara “TIDAK”.

Keempat, artikel berbahasa Indonesia dalam *Jurnal Studi Islam : Tasamuh* dengan judul “*Berita Online Sebagai Instrumen Dakwah: Antara Profetik dan Provokatif (Analisis Framing Media Online Serambinews.com dan Panjimas.com Terhadap Pemberitaan LGBT)*” oleh Efa Rubawati. Penelitian ini menganalisa dua portal berita terkait LGBT, dan bagaimana kedua portal tersebut membikai berita

dalam agenda dakwah. Penelitian ini menggunakan analisis *Framing*. Media online serambinews.com membingkai berita tentang LGBT sebagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Masyarakat dihimbau untuk merangkul LGBT sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.

Hasilnya, Penyampaian pesan dakwah melalui serambinews.com dilakukan secara profetik, yakni dengan menggunakan kata-kata yang baik agar masyarakat terutama umat muslim tidak menjauhi atau mengucilkan LGBT. Sedangkan media online panjimas.com melihat bahwa permasalahan LGBT adalah permasalahan moral. Masyarakat terutama umat Islam harus tegas melihat permasalahan ini, karena jika dibiarkan LGBT akan merusak moral bangsa, terutama generasi muda. Untuk itu, perlu upaya-upaya agar hal tersebut tidak terjadi; umat Islam di Indonesia harus bersatu memaksa agar pemerintah membuat sebuah aturan baku untuk memidanakan LGBT agar tidak menyebarkan hal yang tidak baik kepada masyarakat. Panjimas.com memilih menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui beritanya secara provokatif, menyampaikan dengan tegas, mengajak dengan kata-kata yang intimidatif.

E. Kerangka Teori

1. Konstruksi Sosial atas Realitas

Konstruksi sosial atas realitas adalah proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu mencipatakan secara terus menerus realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Jika media dilihat dari paradigma kontruksionis, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Fakta dan peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionlis, tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas tercipta lewat pandangan tertentu. Media adalah agen konstruksi. Jadi media bukan saluran yang bebas, namun media adalah subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Media lah yang aktif menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak.

Berita adalah hasil konstruksi dari realitas, karena selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Berita bersifat subjektif karena berita adalah produk dari konstruksi atas pemaknaan realitas yang bisa jadi berbeda bagi masing-masing orang. Jika ada perbedaan antara berita dan realitas, itu tidak dianggap sebagai kesalahan namun lebih pada pemaknaan atas realitas.

Wartawan adalah agen konstruksi realitas. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. Terakhir, khalayak memiliki penafsiran sendiri terhadap berita. Hal ini berarti khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif melainkan subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang ia baca. Karena itu, setiap orang bisa memiliki pemaknaan yang berbeda atas teks berita yang sama.⁶

2. Analisis Framing

Framing adalah pendekatan yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. *Framing* juga dimaknai sebagai pendekatan untuk

⁶ Eriyanto, "Analisis Framing: Konstruksi, ideologi dan Politik Media", Yogyakarta: Lkis, 2002, hlm. 27-28.

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Seperti yang dikatakan Told Gitlin, *Framing* adalah sebuah strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan diserhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca.⁷

Dalam pengertian lain, *Framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realitas inilah yang pada akhirnya memunculkan bagian tertentu dari realitas yang menonjol dan mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Sebaliknya, aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol.⁸

Lebih lanjut para ahli mendefinisikan *Framing* dengan berbagai pengertian. Gregory Bateson menilai *Framing* adalah sebuah konsep psikologi yang merujuk pada pentingnya pesan sebagai elemen yang mengkondisikan definisii dan bentukannya. Dalam pemberitaan, *frame* pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.

Todd Gitlin mengungkap bahwa *Framing* dibangun melalui seleksi, penekanan, dan penyajian. Dalam produksi wacana berita, *frame* memungkinkan jurnalis untuk

⁷Ibid, hlm. 79

⁸ Eriyanto, “*Analisis Framing: Konstruksi, ideologi dan Politik Media*”, Yogyakarta: Lkis, 2002, hlm. 77

memproses informasi yang besar secara lebih cepat dan berkesinambungan dan mengemas informasi tersebut untuk disiarkan secara efisien kepada khalayak.

W. A. Gamson melihat *Framing* adalah sebuah organisasi gagasan atau cerita terpusat yang menyediakan arti untuk berbagi kejadian yang berkaitan dengan sebuah isu. Sedangkan menurut Robert Entman, *Framing* dimanifestasikan sebagai ada tidaknya kata kunci, frase, gambar-gambar stereotype, sumber informasi, dan kalimat-kalimat yang disajikan secara tematik yang menguatkan kluster fakta atau penilaian.

Analisis *Framing* pada dasarnya merupakan pendekatan untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai *Framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. *Frame* pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.⁹

Konsep ini selanjutnya dikembangkan oleh Erving Goffman tahun 1974, melalui bukunya yang bertajuk "*Frame Analysis: An essay on The Organization of Experience*". Goffman mengandaikan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Sedangkan analisis *Framing* adalah suatu definisi dari situasi yang dibangun dengan prinsip-prinsip organisasi yang mengatur kejadian dan keterlibatan subyektivitas yang dimiliki didalamnya.¹⁰

⁹ Alex Sobur, "*Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 160.

¹⁰ Ibid, hlm. 160

Sementara Charlotte Ryan pada tahun 1991, menggambarkan analisis *Framing* pada sisi penerimaan pesan. Ia menyatakan analisis *Framing* sebagai sebuah instrumen atau alat untuk memesan informasi tentang apa yang dirasakan khalayak terhadap berbagai masalah.

Dalam perkembangannya, analisis *Framing* tidak hanya diterapkan dalam sosiologi ataupun psikologi, tetapi juga ilmu komunikasi. Analisis *Framing* telah digunakan dalam berbagai penelitian komunikasi. Baik komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, dan lain-lain.

Dalam perspektif komunikasi, analisis *Framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pentautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.¹¹

3. *Framing* Model Robert Entman

Dalam konsepsi Robert Entman, *Framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi. Wartawan memutuskan apa yang akan ia beritakan, apa yang ia liput dan apa yang harus dibuang, apa yang ditonjolkan dan apa yang harus disembunyikan kepada khalayak.¹²

¹¹ Alex Sobur, "*Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 162

¹² Eriyanto, "*Analisis Framing: Konstruksi, ideologi dan Politik Media*", (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. 222

Robert Entman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *Framing* untuk studi isi media. Konsep *Framing* Robert Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sebagai isu tertentu untuk mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu lain. Entman melihat *Framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dalam realitas/isu.¹³

Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dalam hal ini dilihat aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga bagian yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu yang ditampilkan wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Sedangkan penonjolan aspek tertentu dari isu, yaitu bagian ini berhubungan dengan penulisan fakta. Dalam hal ini, dilihat bagaimana aspek tertentu ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.¹⁴

Model *Framing* Robert Entman menjelaskan *Define Problem* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan masalah), *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral atau nilai-nilai moral) dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) dalam membaca *Framing* sebuah teks yang ditampilkan. Empat dimensi *Framing* menurut Robert N. Entman sesuai dengan tabel 1.

¹³Ibid hlm, 221

¹⁴ Ibid.hlm. 222

Tabel 1**Model *Framing* Robert N. Entman**

<i>Define problems</i> (pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat dan disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgment</i> (membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang akan disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendealektika suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Penyelesaian yang ditawarkan)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Secara rinci, empat aspek dalam model *Framing* Robert Entman dijelaskan sebagai berikut. Pertama, *define Problem* adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *Framing*. Elemen ini merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Menekankan pada bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu itu dipahami secara berbeda. Bingkai berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.¹⁵

¹⁵ Eriyanto, "*Analisis Framing: Konstruksi, ideologi dan Politik Media*", Yogyakarta: Lkis, 2002, hlm. 225. Dikutip dari Robert N. Entman and Andrew Rojecki, "Freezing Out the Public: Elite Media *Framing* of the US Anti Nuclear Movement" dalam *Political Communication*, Vol.10, No.1, 1993, hlm. 157

Kedua, *diagnose causes* merupakan elemen *Framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dalam suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami, menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

Ketiga, *make moral judgement* adalah elemen *Framing* yang dipakai untuk membenarkan atau memberikan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Keempat, *treatment recommendation*. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki watawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tergantung bagaimana peristiwa tersebut dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini mengacu pada paradigma konstruktivis yang berpandangan bahwa realitas itu mustahil bebas nilai, karena realitas diciptakan dari konstruksi yang terus berkembang. Penelitian ini merupakan analisis teks media yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah riset yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Model deskriptif artinya

¹⁶ Eriyanto, “*Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*”, Yogyakarta: Lkis, 2002, hlm. 225-227

mengumpulkan informasi, aktual secara rinci yang menjelaskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan atau evaluasi.¹⁷

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah media online republika.com dan Detik.com. Sedangkan objek penelitiannya adalah pemberitaan terkait larangan Keraton Yogyakarta terhadap *Muslim United* yang dipublikasikan oleh media online republika.com dan Detik.com periode 1-13 Oktober 2019.

3. Batasan Masalah dan Kategorisasi Berita

Penelitian ini memiliki batasan masalah dan fokus hanya pada pemberitaan terkait larangan Keraton terhadap *Muslim United* oleh Republika Online dan Detik.com. Berita yang dianalisis adalah berita yang diupload di media online Republika Online dan Detik.com pada periode 1 Oktober-13 Oktober 2019. Dipilihnya periode tersebut karena surat balasan dari Keraton mengenai perizinan acara *Muslim United* beredar di media sosial sejak 1 Oktober 2019, kemudian acara tersebut rencananya akan diselenggarakan pada 13 Oktober 2019.

Selama periode 1-13 Oktober, banyak media online yang menyoroti isu tersebut dan perhatian publik pun lebih terpusat. Republika Online telah mengunggah sebanyak 11 artikel sedangkan Detik.com sebanyak 13 artikel. Daftar berita yang diunggah oleh Republika Online dan Detik.com sebagaimana dalam tabel.

¹⁷ Jalaluddin Rahmat, “*Metode Penelitian Komunikasi*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005 hlm. 25

Tabel 2

Berita Republika Online dan Detik.com periode 1-13 Oktober 2019

No	Detik.com	Republika.co.id
1	Alasan Keraton Yogya Larang <i>Muslim United</i> Digelar di Masjid Gedhe Kauman.	Keraton Tolak Pinjamkan Areanya kepada Panitia <i>Muslim United</i> .
2	Keraton Yogya Tak Izinkan Masjid Gedhe Jadi Tempat Acara <i>Muslim United</i> .	<i>Muslim United</i> Dilarang Keraton, Haedar: Kami Menghargai.
3	Keraton Yogya Tak Beri Izin <i>Muslim United</i> di Masjid Gedhe, Ini Kata Panitia.	Ditolak Keraton Yogyakarta, <i>Muslim United</i> Tetap Berjalan.
4	Tak Diberi Izin Keraton Yogya, Panitia <i>Muslim United</i> Diminta Cari Tempat Lain.	Keraton Cabut Izin <i>Muslim United</i> Jelang Hari H.
5	Tak Izinkan Acara <i>Muslim United</i> di Masjid Gedhe, Sultan: Kita yang Punya Rumah.	<i>Muslim United</i> Tetap Berjalan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab.
6	Sultan HB X: Keraton Tak Izinkan Masjid Gedhe untuk Acara <i>Muslim United</i> .	Polda DIY Tanggapi Pemandahan <i>Muslim United</i> ke Jogokariyan.
7	Acara <i>Muslim United</i> di Masjid Gedhe Tak Berizin, Ini Penjelasan FUI.	Acara <i>Muslim United</i> Pindah, Panitia: Demi Kebaikan Bersama.
8	Tak Berizin, <i>Muslim United</i> Tetap digelar di Masjid Gedhe Yogyakarta Hari Ini.	<i>Muslim United</i> Tetap digelar di Masjid Gedhe Kauman.
9	Jika <i>Muslim United</i> Tetap Gelar Acara di Masjid Gedhe, Sultan; Urusan Polisi	Acara <i>Muslim United</i> Dipindah ke Masjid Jogokariyan.
10	<i>Muslim United</i> Tetap Digelar di Masjid Gedhe, Panitia: Diakomodir Takmir.	<i>Muslim United</i> Pindah, Polda DIY Bantu Pengamanan Acara.

11	Kami Belum Terima Permohonan Acara <i>Muslim United</i> di Yogya.	<i>Muslim United</i> Pindah Lokasi, Jamaah dan Pedagang Kecewa.
12	Tak Izinkan di Kauman, Acara <i>Muslim United</i> Dipindah ke Jogokariyan.	-
13	Panitia <i>Muslim United</i> di Yogya Mulai Pindahan ke Masjid Jogokariyan.	-

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis berita, peneliti membuat pengelompokan berita-berita atau disebut dengan kategorisasi berita, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap berita yang disajikan kedua media dipilih dan diseleksi untuk dimasukkan kedalam masing-masing kategori, kemudian peneliti mengambil satu dan dua berita untuk dianalisis.
- b. Kategori dibuat berdasarkan dari isu besar berita yang dimuat dari kedua media tersebut.
- c. Jenis berita yang dianalisis adalah straight news atau dengan kata lain berita yang hanya disajikan secara singkat dan terpenting saja, serta berita yang dipilih untuk dianalisis mewakili dari beberapa berita.

Dengan demikian, peneliti menentukan empat kategori topik utama dalam berita. Pertama, **kategori berita ‘Larangan/Penolakan dari Keraton’**. Peneliti memilih satu berita dari masing-masing media untuk dianalisis. Dari media Detik.com berjudul “*Alasan Keraton Yogya Larang Muslim United Digelar di Masjid Gedhe*

Kauman” dan dari media Republika Online berjudul “Keraton Tolak Pinjamkan Areanya kepada Panitia Muslim United.”

Kedua, **kategori ‘Pelaksanaan Acara Muslim United.’**, dipilih dua berita dari masing-masing media. Berita dari Republika berjudul *“Muslim United Tetap Berjalan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab” dan “Ditolak Keraton Yogyakarta, Muslim United Tetap Berjalan.”* Sementara dari Detik.com berjudul *“Muslim United Tetap Digelar di Masjid Gedhe, Panitia: Diakomodir Takmir.”* dan berita berjudul *“Jika Muslim United Tetap Gelar Acara di Masjid Gedhe, Sultan; Urusan Polisi.”*

Ketiga, **kategori ‘Tanggapan Tokoh Agama’**, dengan berita dari Detik.com berjudul *“Acara Muslim United di Masjid Gedhe Tak Berizin, Ini Penjelasan FUI.”* Sedangkan dari Republika Online berjudul *“Muslim United Dilarang Keraton, Haedar: Kami Menghargai.”*

Keempat **kategori ‘Muslim United Pindah**, terdapat satu berita yang diambil dari masing-masing media. Untuk Republika Online ada berita berjudul *“Acara Muslim United Pindah, Panitia: Demi Kebaikan Bersama.”* Sedangkan untuk Detik.com dengan berita berjudul *“Tak Izinkan di Kauman, Acara Muslim United Dipindah ke Jogokariyan.”*

Sehingga jumlah semua berita yang akan diteliti berjumlah sepuluh berita yang terdiri dari lima berita Republika Online dan lima berita dari Detik.com. Daftar berita yang akan dianalisis sebagaimana disebutkan dalam tabel .

Tabel 3
Daftar Berita Republika Online

No	Waktu	Judul
1	Kamis, 3 Oktober 2019 pukul 19.49 WIB	Keraton Tolak Pinjamkan Areanya kepada Panitia <i>Muslim United</i> .
2.	Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 11.59	<i>Muslim United</i> Tetap Berjalan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab
3	Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 12.07	<i>Muslim United</i> Dilarang Keraton, Haedar: Kami Menghargai.
4	Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 13.29	Ditolak Keraton Yogyakarta, <i>Muslim United</i> Tetap Berjalan.
5	Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 12.33	Acara <i>Muslim United</i> Pindah, Panitia: Demi Kebaikan Bersama.

Tabel 4
Daftar Berita Detik.com

No	Waktu	Judul
1	Rabu, 2 Oktober 2019 pukul 15.55	Alasan Keraton Yogya Larang <i>Muslim United</i> Digelar di Masjid Gedhe Kauman.
2	Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 12.30	Jika <i>Muslim United</i> Tetap Gelar Acara di Masjid Gedhe, Sultan; Urusan Polisi.
3	Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 16.21	<i>Muslim United</i> Tetap Digelar di Masjid Gedhe, Panitia: Diakomodir Takmir.
4	Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 19.11	Acara <i>Muslim United</i> di Masjid Gedhe Tak Berizin, Ini Penjelasan FUI.
5	Sabtu, 12 Oktober 2019 pukul 14.33	Tak Izinkan di Kauman, Acara <i>Muslim United</i> Dipindah ke Jogokariyan.

4. Teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sehingga teknik pengumpulan datanya sebagai berikut.

a. Telaah Teks, yakni mencari data-data yang berkaitan dengan Keraton dan *Muslim United* baik dalam bentuk berita, jurnal, skripsi, maupun transkrip-transkrip lainnya.

b. Dokumentasi, yakni salah satu metode penelitian yang dilakukan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diambil berasal dari berita-berita yang diunggah oleh Republika Online dan Detik.com.

5. Teknik Analisis Data.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis *Framing* model Robert Entman. Setelah mengumpulkan data, peneliti akan menganalisis pemberitaan sesuai dengan empat dimensi *Framing* menurut Robert N. Entman, yakni *Define Problem* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan masalah), *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral atau nilai-nilai moral) dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian).

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika Pembahasan berfungsi sebagai gambaran tentang alur penulisan skripsi, alur berpikir, dan runtutan pembahasan. Sistematika Pembahasan juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lebih terarah mengenai skripsi yang akan dibuat. Oleh sebab itu, sistematika pembahasan dan penulisan skripsi ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, serta Metode Penelitian.

BAB II: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas mengenai Gambaran Umum dari kedua media online yakni Republika Online dan Detik.com, mulai dari sejarah singkat, company profile, dan visi misi media

BAB III: PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang akan memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Seluruh data yang disajikan bisa dibagi menjadi beberapa sub bab. Untuk penelitian terkait *Framing* pemberitaan pada Republika Online dan Detik.com, peneliti membagi sub bab sebagai berikut:

- A. Analisis *Framing* Berita Larangan Keraton terhadap *Muslim United* di Republika Online dan Detik.com
- B. Perbandingan *Framing* antara Republika Online dan Detik.com

BAB IV: PENUTUP

Pada bagian Penutup akan memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi tentang rangkuman jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Jawaban tersebut haruslah substansif terhadap data yang telah diolah peneliti. Sedangkan Saran berisi tentang masukan-masukan terkait penelitian, sehingga bisa dikembangkan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka akan memuat seluruh rujukan yang digunakan dalam penelitian, baik buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang tersusun berdasarkan ketentuan dalam penulisan daftar pustaka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah diteliti mengenai pemberitaan larangan Keraton terhadap *Muslim United* di Media Online Republika Online dan Detik.com periode 1-13 Oktober 2019, maka diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Republika Online sebagai media yang fokus pada isu keIslaman cenderung menuliskan pemberitaan yang menyoroti kepentingan umat dari ideologi yang teak lepas dari agama Islam. Dengan menggunakan model analisis Framaing Robert N Entman, peneliti menemukan bahwa Republika Onlinemembingkai bahwa *Muslim United* tetap merupakan bentuk majelis dakwah yang ingin melakukan syiar agama. Sehingga sudah seharusnya acara ini didukung dan terjamin kemanannnya. Adanya peristiwa larangan Keraton terhadap *Muslim United* ini juga dibingkai sebagai salah satu fenomena yang bisa dijadikan pelajaran soal bagaimana menjaga persatuan umat dan menjadikan masjid sebagai pusatnya.
2. Detik.com merupakan salah satu media yang nasionalis dan sering mengangkat pemberitaan kaitannya dengan kebijakan pemerintah, karena itulah dalam peristiwa Larangan Keraton terhadap *Muslim United* ini, Detik.com lebih menonjolkan pernyataan soal kepemilikan Masjid Gedhe Kauman. Sehingga Keraton berhak melarang siapa saja, termasuk *Muslim United* yang ingin menggunakan Masjid Gedhe

Kauman sebagai tempat acara. Detik.com cenderung berpihak pada pemerintah dalam hal ini Keraton serta aparat kepolisian yang ingin menjaga kondisi di Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan, yakni analisis *Framing* memang cocok untuk mengetahui bagaimana kecenderungan media dalam melihat dan membingkai suatu peristiwa. Namun akan lebih mendalam jika dibarengi dengan melihat peta ideologi media, dan melihat bagaimana media mengontrol nilai-nilai atau visi misi mereka dengan melalui wawancara bersama para praktisi media yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Eriyanto. 2018. *Media dan Opini Publik: Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengerahkan Pandangan Publik (Priming)*. Depok: Rajawali Press.
- Romli, Asep Syamsul 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahmat, Jalaluddin. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jurnal

- Rempoutzakon, Filippou. (2017). *Framing Theory in Newspaper Coverage of the 2015 Greek Reverendum* *Elon Journal of Undergraduated Reseach in Communications*. *Elon Journal*, vol 8:2.
- Tike, Afifuddin. (2018). *Konstruksi Pemberitaan Konflik etnis Rohingya (Analisis Framing Robert Entman pada Harian Sindo Makasar Edisi September 2017)*. *Jurnal Al Kitabah*, vol 5:2.

Skripsi

Farihunnisa. 2016. *Analisis Framing Pemberitaan Aksi Teror di Islamic Center of Quebec, Canada Dalam Republika Online dan Detik.com*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah.

Rubawati, Efa. 2018. *Berita Online Sebagai Instrumen Dakwah: Antara Profentik dan Provokatif (Analisis Framing Media Online Serambinews.com dan Panjimas.com Terhadap Pemberitaan LGBT)*

Wulandari, Nur Aisya. 2016. , *Analisis Framing Pemberitaan Foto Preweding pada Media Online Detik.com dan Kompas.com*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Website

<https://republika.co.id/berita/pysuas414/keraton-tolak-pinjamkan-areanya-kepada-panitia-muslim-united> Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

<https://nasional.republika.co.id/berita/pz761q291/ditolak-keraton-yogyakarta-muslim-united-tetap-berjalan> Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/pz8y3h291/acara-muslim-united-pindah-panitia-demi-kebaikan-bersama> Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

<https://nasional.republika.co.id/berita/pzad2c291/muslim-united-pindah-lokasi-jamaah-dan-pedagang-kecewa> Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4730881/alasan-keraton-yogya-larang-muslim-united-digelar-di-masjid-gedhe-kauman> Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4731284/keraton-yogya-tak-beri-izin-muslim-united-di-masjid-gedhe-ini-kata-panitia> Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4732856/tak-diberi-izin-keraton-yogya-panitia-muslim-united-diminta-cari-tempat-lain> Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4742178/jika-muslim-united-tetap-gelar-acara-di-masjid-gedhe-sultan-urusan-polisi> Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4742578/muslim-united-tetap-digelar-di-masjid-gedhe-panitia-diakomodir-takmir> Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4742920/acara-muslim-united-di-masjid-gedhe-tak-berizin-ini-penjelasan-fui> Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4743418/tak-diizinkan-di-kauman-acara-muslim-united-dipindah-ke-jogokariyan> Diakses pada Jumat, 11 Oktober 2019 pukul 22.12 WIB

<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/10/11/pz7231291-keraton-cabut-izin-muslim-united-jelang-hari-h> Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

<https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/10/11/pz728s291-muslim-united-dilarang-keraton-haedar-kami-menghargai> Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/10/11/pz71uo291-muslim-united-tetap-berjalan-sebagai-bentuk-tanggung-jawab> Diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019 pukul 20.10 WIB

LAMPIRAN

Daftar Berita Republika Online

Keraton Tolak Pinjamkan Areanya kepada Panitia *Muslim United*

Kamis 03 Oct 2019 19:49 WIB

Red: Reiny Dwinanda



Masjid Gedhe Kauman.

Foto: Yusuf Assidiq.

Area yang hendak dipinjam panitia *Muslim United* merupakan fasilitas pribadi Keraton.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menolak memberikan izin atas permintaan peminjaman sejumlah fasilitas milik **Keraton** untuk kegiatan "*Muslim United: Sedulur Saklawase*" yang digelar Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Area yang dimaksud mencakup Ndalem Pengulon, Masjid Gedhe Kauman, serta Alun-Alun Utara.

Dalam acara yang dijadwalkan digelar 11-13 Oktober 2019 itu, Ndalem Pangulon Masjid Gedhe rencananya akan digunakan sebagai area prasmanan pengisi acara dan area tamu VVIP acara *Muslim United*.

"Ya tidak (mengizinkan), fungsinya bukan untuk itu," kata Raja Keraton Ngayogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks DPRD DIY, Kamis.



*Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta biasa digunakan untuk lokasi shalat Idul Fitri. Panitia **Muslim United** berkeinginan untuk mengelat acaranya di Alun-Alun Utara, namun tak dapat izin dari pihak Keraton.*

Menurut Sultan, Ndalem Pengulon yang berada di kompleks **Masjid Gedhe Kauman** bukan tempat untuk menyiapkan makanan. Ndalem Pengulon merupakan tempat tinggal pejabat penghulu Keraton yang mengurus masalah keagamaan di Keraton Yogyakarta.

"(Ndalem) Pengulon itu (hendak digunakan) untuk tempat menyiapkan makanan. *Kan* bukan bagiannya Pengulon untuk makanan," kata Sultan yang juga Gubernur DIY ini.

Kegiatan *Muslim United* rencananya akan mendatangkan beberapa ustaz seperti Abdul Somad, Hanan Attaki, Lutfi Basori, Adi Hidayat, Bachtiar Nasir, hingga Felix Siauw. Dalam acara yang berlangsung selama tiga hari itu akan ada Muslim Expo, tabligh akbar, kegiatan sosial, festival kuliner, *gathering* komunitas Muslim, dan area anak.

Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat GKR Condrokirono juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya belum mengizinkan peminjaman sejumlah tempat milik Keraton, yakni Masjid Gedhe Keraton serta halaman, Ndalem Pangulon, dan Alun-alun Utara untuk kegiatan *Muslim United*. Pernyataan tersebut termuat dalam surat tertanggal 28 September.

Menantu Sultan HB X, KPH Notonegoro, mengatakan bahwa sejumlah tempat yang dimaksud merupakan milik pribadi Keraton Yogyakarta. Oleh karena itu, tidak perlu alasan untuk menjelaskan penolakan izin tersebut.

"Ini *kagungan* (milik) Ndalem *kok*, kami tidak perlu (memberikan) alasan apa-apa," kata suami GKR Hayu ini.

'Muslim United Tetap Berjalan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab'

Jumat 11 Oct 2019 11:59 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi



Suasana pengunjung yang memadati Kompleks Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta dan stan di acara Muslim United, Selasa (16/10). Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 16 hingga 18 Oktober 2018.

Foto: Republika/Silvy Dian Setiawan

acara tersebut sudah dipersiapkan sejak lama.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- *Muslim United* yang digelar di **Masjid Gedhe Kauman** akan tetap digelar. Acara ini akan tetap berjalan walaupun mendapat penolakan dari pihak Keraton Yogyakarta.

Marbot Masjid Gedhe Kauman, Prayuti mengatakan, tetap digelarnya acara sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Sebab, acara tersebut sudah dipersiapkan sejak lama.

Bahkan, ia sendiri juga heran dengan penolakan dari pihak keraton. Sebab, pada acara ***Muslim United*** di tahun sebelumnya tidak ada masalah.

"Itu dulu boleh, tahun lalu. Tidak ada larangan. Tapi kenapa tahun ini tidak boleh," kata Prayuti saat ditemui di Masjid Gedhe Kauman, Kamis (10/10).

Bahkan, pelaksanaan tahun lalu juga tidak meninggalkan kesan buruk. Bahkan, untuk pelaksanaan tahun ini, pihaknya bersama panitia juga sudah berkoordinasi dengan pihak lain untuk keamanan.

"Kalau hal keamanan, kita siap. Dari pihak panitia sudah koordinasi dengan takmir dan warga. Tahun lalu *Insya Allah* aman, tidak ada apa-apa," jelasnya.

Selain itu, tiap ada acara atau pengajian pihaknya pun juga terus memberi tahu kepada pihak keraton. Hal itu pun, katanya, tidak perlu izin.

Namun, hanya cukup untuk memberi tahukan kepada keraton. Bahkan, keraton selalu memberikan izin.

"Kalau untuk pengajian cukup kita memberi tahu. Jadi sifatnya bukan izin. Tapi kita menjadi dilematis. Di satu sisi kita itu dulu boleh," ujarnya.

Acara ini digelar pada 11 hingga 13 Oktober. Acara ini akan diisi oleh berbagai tokoh diantaranya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Felix Siauw, Ustaz Derry Sulaiman, Ustaz Hanan Attaki dan tokoh lainnya.

Muslim United Dilarang Keraton, Haedar: Kami Menghargai

Jumat 11 Oct 2019 12:07 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi



Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

Foto: Republika TV/Fian Firatmaja

Diperlukan sosialisasi dan dialog yang lebih dalam menyelesaikan masalah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketua Umum PP Muhammadiyah **Haedar Nashir** ikut berkomentar terkait penolakan penyelenggaraan **Muslim United** di **Masjid Gedhe Kauman** oleh Keraton Yogyakarta. Ia mengatakan, menghargai setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Keraton.

"Kami menghargai setiap pilihan-pilihan ketika kebijakan itu diambil untuk menjaga keutuhan masyarakat, keutuhan bangsa," kata Haedar di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Kamis (10/10).

Ia mengatakan, diperlukan sosialisasi dan dialog yang lebih dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga, seluruh pihak dapat paham dengan langkah yang diambil.

Haedar pun meminta, baik kepada tokoh-tokoh yang terlibat untuk memiliki pemikiran kebangsaan dan keagamaan. Sehingga mengarah kepada kesatuan, bukannya membuat kerenggangan satu sama lain.

"Kelompok-kelompok politik, sosial dan agama itu perlu untuk dewasa. Ketika kita punya ruang demokrasi untuk kegiatan-kegiatan publik, itu gunakan itu untuk merekat kebersamaan, meningkatkan kecerdasan, mencerahkan hati," kata Haedar.

Walaupun mendapat penolakan, acara *Muslim United* ini tetap digelar mulai 11 hingga 13 Oktober 2019. Tetap digelarnya acara karena persiapan yang dilakukan sudah matang, sementara pihak keraton dinilai menolak izin saat gelaran acara hampir dekat.

"(Acara) tidak boleh. Tapi *kan* kita sudah telanjur bayar hotel, *katering* sekian ratus juta, *gimana?* Mepet *gitu*, masak harus dibatalkan," kata marbut Masjid Gedhe Kauman, Prayuti, saat ditemui di Masjid Gedhe Kauman, Kamis (10/10).

Ditolak Keraton Yogyakarta, *Muslim United* Tetap Berjalan

Jumat 11 Oct 2019 13:29 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/my27/ Red: Fernan Rahadi



Keraton Yogyakarta

Foto: *Republika/Imam Budi Utomo*

Kegiatan *Muslim United* ini tidak didasari atas kepentingan kelompok mana pun.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Acara *Muslim United* 2019 tetap berjalan di Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, meskipun terdapat penolakan dari Keraton

Yogyakarta. Berdasarkan pantauan *Republika*, Jumat (11/10) pagi, sekitar 2.000 orang sudah terlihat memenuhi Masjid Gedhe Kauman hingga halaman masjid tersebut.

Acara perdana pun telah dimulai pada pukul 09.30 hingga 11.15 WIB dengan judul tema 'Muda Mendunia'. Dua pembicara yang tampil pada kajian perdana tersebut adalah Sherly Annavita Rahmi dan Ustaz Amer Adzikra.

Selanjutnya, usai Shalat Jumatan ada kajian dari Ustaz Fatih Karim dan Kang Puji Hartono. Kemudian setelah Shalat Ashar akan ada kajian dari Ustaz Hanan Attaki dengan tema 'Hati Sepi Tanpa-Mu'

Ketua Panitia *Muslim United 2019*, Nanang Syaifurozi mengatakan, acara tersebut tidak seperti yang disangkakan negatif selama ini.

"Saya yakin ini adalah murni syiar agama dan tidak berbenturan dengan kepentingan apa pun, jadi tidak ada alasan untuk menghalanginya. Apalagi tempatnya di masjid dan ini memang pengajian," kata Nanang dalam keterangan resminya dari pihak panitia saat dimintai keterangan perihal tersebut.

Ia menegaskan, kegiatan *Muslim United* ini juga tidak didasari atas kepentingan kelompok mana pun. Namun, murni untuk mempersatukan kembali umat muslim di Indonesia melalui kajian-kajian agama yang mengangkat tema tentang persatuan.

"Perihal tuduhan yang macam-macam, kita ingin membuktikan kalau (tuduhan itu) tidak benar, jadi kajian, walau ramai orang, tapi tertib, bersih, tidak ada provokator, tidak ada intimidasi, tidak ada ujaran kebencian," jelasnya.

Ia menjelaskan, digelarnya acara ini di Masjid Gedhe Kauman dengan alasan masjid tersebut memiliki nilai sejarah. Yang mana, masjid tersebut merupakan simbol Kerajaan Mataram di Yogyakarta dan memiliki kontribusi besar terhadap persatuan umat Muslim.

Untuk itu, ia tetap mengajak seluruh masyarakat untuk tetap datang ke acara tersebut. Sehingga persatuan dan kesatuan umat muslim semakin erat dan menjauhkan diri dari perpecahan.

"Tetap datang, *nggak* usah takut, kita niatkan karena Allah, dengan niat baik, dengan adab yang baik. *Bismillah!* Insya Allah akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT," kata Nanang.

Acara ini di antaranya akan diisi oleh sejumlah ustaz dan dai seperti Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Luthfi Basori, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bachtiar Nasir, Ustaz Salim A Fillah, hingga Ustaz Felix Siauw. Selain itu juga dihadiri oleh lebih banyak ustaz hingga sekitar 40 ustaz yang akan mengisi kajian dari subuh sampai malam.

Muslim United tahun ini melibatkan hingga 1.000 panitia dan relawan yang didatangkan dari berbagai komunitas Muslim di Indonesia. Acaranya juga terbuka untuk umum tanpa perlu melakukan registrasi.

Berbagai rangkaian acara pun, kata Nanang, telah dipersiapkan guna mengisi agenda *Muslim United* selama tiga hari berturut-turut mulai 11 hingga 13 Oktober 2019 meliputi Tabligh Akbar, Muslim Expo, Bazaar, Social Activity, Muslim Community Gathering, Food Festival, hingga beberapa performa yang akan ditampilkan oleh KHAT dan Khoiru Ummah.

"Kegiatan pun akan dimeriahkan dengan berbagai *doorprize* hingga grand prize umroh gratis," ujarnya.

Sebelumnya, tanggal 28 September 2019, Keraton melalui suratnya yang ditandatangani GKR Condrokirono mengeluarkan pernyataan menolak permohonan panitia untuk menggunakan Masjid Gedhe beserta halamannya, Ndalem Pengulon, dan Alun-alun Utara sisi barat yang akan dipakai acara *Muslim United* Jilid 2.

Keraton melalui surat yang ditandatangani KGPH Hadiwinoto tertanggal 5 Agustus 2019 sebenarnya sudah memberi izin penggunaan Alun-alun Utara untuk acara *Muslim United* selama tiga hari 11-13 Oktober 2019. Akan tetapi tiga hari setelah surat dari GKR Condrokirono, Hadiwinoto kembali mengirimkan surat kepada panitia yang menyatakan mencabut izin tersebut.

Acara *Muslim United* Pindah, Panitia: Demi Kebaikan Bersama

Sabtu 12 Oct 2019 12:33 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi



Muslim United Tetap Diadakan. Ustaz Hanan Attaki (tengah) menyampaikan tausiyah saat acara Muslim United di Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, Jumat (11/10/2019).

Foto: Republika/ Wihdan

Panitia menyangkal terdapat upaya pembubaran acara tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Panitia acara Muslim United resmi mengumumkan pemindahan acara dari Masjid Gedhe Kauman ke Masjid Jogokariyan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia *Muslim United* 2019, Nanang Syaifurozi.

"*Bismillah*, kami pindah," kata Nanang saat dikonfirmasi terkait pemindahan tersebut sambil mengirimkan poster pengumuman pemindahan *Muslim United* kepada *Republika*, Sabtu (12/10).

Ia mengatakan, pemindahan tersebut berdasarkan keputusan bersama. Yakni antara Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) DIY, Takmir Masjid Gedhe Kauman dan *official crew Muslim United* 2019.

"Maka *Muslim United* #2 mulai sore ini tanggal 12/10/2019 jam 15.00 WIB akan berlangsung di Masjid Jogokariyan Yogyakarta," lanjut Nanang.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk menghadiri acara tersebut di Masjid Jogokariyan. "*Sedulur saklawase, ayo mangkat rame-rame!* (saudara selamanya, ayo berangkat bersama-sama)," katanya.

Terkait alasan pemindahan, panitia menyatakan hal itu dilakukan karena mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Panitia menyangkal jika terdapat upaya pembubaran acara tersebut

"Kami melihat ada kemudharatan jika acara ini diteruskan (di Masjid Gedhe Kauman-red)," kata Koordinator Keamanan *Muslim United*, Syaifullah Nur Iqbal Mustofa yang dihubungi *Republika*, Sabtu.

Sebelumnya, acara ini digelar di Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta sejak Jumat (11/10) kemarin. Acara ini sebenarnya sudah ditolak oleh **Keraton Yogyakarta** untuk dilaksanakan di masjid tersebut. Namun, acara itu tetap dilaksanakan walaupun mendapat penolakan dari keraton. Bahkan, hari pertama pelaksanaannya pun terbilang lancar dan antusiasme pengunjung cukup besar.

Namun pada Jumat malam, setelah adanya diskusi dari FUI DIY, Takmir Masjid Gedhe Kauman, dan *official crew Muslim United 2019*, bersama dengan Polda DIY beserta warga Kauman akhirnya dicapai kesepakatan untuk memindahkan acara ke Masjid Jogokariyan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan tidak ada titik temu dari pihak Keraton yang sudah melarang acara digelar di Masjid Gedhe Kauman.

"Titik temunya adalah pindah ke tempat yang sudah jelas, takmir mendukung, dan warga juga mendukung. Mengingat acara ini *kan* sudah menjadi milik warga Kauman," ujar Iqbal.

Ia pun tak menyangkal jika kerugian materi yang diakibatkan pemindahan ini cukup besar. "Namun kami sudah menerima keputusan ini bersama. Selain itu kami juga ingin menjaga marwah Sultan (Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X-red)," katanya.

Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto, juga membenarkan pernyataan panitia. Ia menyatakan tidak benar jika ada kabar yang menyebutkan Polda meminta acara tersebut dipindah. "Polda tidak *nyuruh* pindah, kami tidak bilang seperti itu," kata Yulianto saat dihubungi *Republika*.

Acara *Muslim United* di antaranya diisi oleh sejumlah ustaz dan dai seperti Ustaz Hanan Attaki, Ustaz Luthfi Basori, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Bachtiar Nasir, Ustaz Salim A Fillah, hingga Ustaz Felix Siauw. Selain itu juga dihadiri oleh lebih banyak ustaz hingga sekitar 40 ustaz yang akan mengisi kajian dari subuh sampai malam.

Daftar Berita Detik.com

Alasan Keraton Yogya Larang *Muslim United* Digelar di Masjid Gedhe Kauman

Usman Hadi - detikNews

Rabu, 02 Okt 2019 15:55 WIB

188 komentar

SHARE [URL telah disalin](#)



Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta (Usman Hadi/detikcom)

Yogyakarta - Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tak mengabulkan permohonan penggunaan Kagungan Ndalem (KgD) Masjid Gedhe Keraton (Kauman) beserta halaman, Ndalem Pengulon, dan Alun-alun Utara sisi barat untuk kegiatan *Muslim United*. Apa alasannya?

"Saya hanya menjaga saja keamanan di Jogja (berkaitan dengan) acara yang sifatnya pengerahan massa," ujar Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, saat dimintai konfirmasi **detikcom** melalui pesan singkat, Rabu (2/10/2019).

Putri kedua Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan HB X itu juga mengaku tak menyangka surat yang ditandatanganinya itu viral di media sosial (medsos).

Condrokirono melanjutkan hanya ingin menjaga situasi Yogyakarta tetap kondusif terkait dengan situasi saat ini.

"Karena sekarang kan baru banyak demo di mana-mana," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan bernama '*Muslim United: Sedulur Saklawase*' itu diadakan oleh Forum Ukhuwah Islamiyyah digelar pada 11-13 Oktober 2019.



Pihak panitia sebelumnya melayangkan surat permohonan untuk menggunakan KgD Masjid Kauman.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dan tertera pada poster acara, ada sejumlah ustaz yang akan mengisi acara tersebut. Pengisi acara tersebut di antaranya Abdul Somad, Adi Hidayat, Salim A Fillah, Bachtiar Nasir, Felix Siau, Ali Jaber, Ahmad Heryawan, dan Arie Untung.

Berita 2

Keraton Yogya Tak Beri Izin *Muslim United* di Masjid Gedhe, Ini Kata Panitia

Usman Hadi - detikNews

Rabu, 02 Okt 2019 19:42 WIB

[147 komentar](#)

SHARE [URL telah disalin](#)

Ketua Panitia *Muslim United* 2019, Nanang Syaifurozi, Rabu (2/10/2019). (Foto: dok. pribadi)

Sleman - Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tak memberikan izin penggunaan KgD Masjid Gedhe Keraton (Kauman), Ndalem Pengulon, dan Alun-alun Utara sisi barat untuk kegiatan *Muslim United*. Apa respons panitia acara terkait keputusan itu?

Ketua Panitia *Muslim United* 2019, Nanang Syaifurozi, mengatakan pihaknya sudah menerima surat yang dikeluarkannya pihak Keraton Yogya. Surat itu berisi keputusan pihak Keraton yang belum dapat memberikan izin penggunaan Masjid Gedhe Kauman.

"Sudah... sudah...," kata Nanang menjawab pertanyaan apakah pihak panitia *Muslim United* sudah menerima surat yang ditandatangani Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono.

Hal itu disampaikan Nanang saat ditemui **detikcom** di kediamannya di Condongcatur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Keraton Yogya Tak Izinkan Masjid Gedhe Jadi Tempat Acara Muslim United

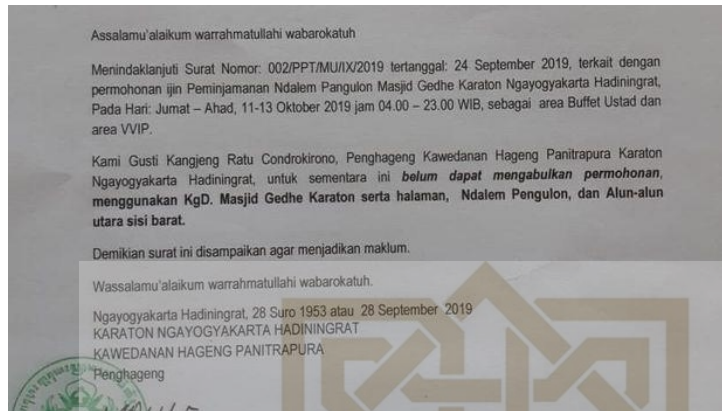
Nanang menjelaskan *Muslim United* 2019 merupakan acara kedua setelah acara pertama tahun lalu. Untuk tahun ini, katanya, pihaknya telah mempersiapkan keperluan acara jauh-jauh hari, termasuk mengajukan peminjaman Alun-alun Utara.

Sebenarnya pihak panitia mengajukan permohonan penggunaan Alun-alun Utara Kota Yogyakarta untuk 4-6 Oktober 2019. Namun, karena pada tanggal tersebut ada kegiatan di sana, acara *Muslim United* diundur menjadi 11-13 Oktober.

"Jadi waktu itu (penggunaan Alun-alun Utara tanggal 11-13 Oktober 2019) sudah mendapatkan izin dari Gusti Hadi (KGPH Hadiwinoto), beliau mengeluarkan suratnya, nggak ada masalah. Terus kami lanjut semuanya nih, paralel," tutur Nanang.

Baca juga: Alasan Keraton Yogya Larang Muslim United Digelar di Masjid Gedhe Kauman

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Keraton Yogyakarta tak mengizinkan acara *Muslim United* memakai Masjid Gedhe Kauman, Rabu (2/10/2019). (Foto: dok. Istimewa)

"Kemudian muncul surat dari Gusti Condokirono yang itu malah secara keseluruhan, bahkan Masjid Gedhe pun tidak boleh digunakan," sambungnya.

Untuk sementara ini Nanang tak ingin tergesa-gesa menanggapi surat dari Kawedanan Hageng Panitrapura itu.

"Jadi kami posisi *wait and see, gitu*. Kami tidak mau bikin sesuatu pernyataan yang terus menentang atau bagaimana, *ndak*," ujarnya.

Panitia *Muslim United* 2019 akan bertabayun terhadap pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal itu dilakukan setelah permohonan izin penggunaan Masjid Gedhe Keraton (Kauman) untuk kegiatan *Muslim United* 2019 tak dikabulkan.

"Kami sudah mengajukan untuk ketemu dengan beliau (Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura, GKR Condokirono), dengan pihak Keraton. Kami akan sowan nanti," kata Nanang, Rabu (2/10/2019).

Nanang memperkirakan proses tabayun antara panitia *Muslim United* 2019 dan pihak Keraton Yogyakarta tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, GKR Condokirono dan sejumlah kerabat Keraton Yogyakarta masih berada di Jakarta.

"Karena beliau (kerabat Keraton, termasuk GKR Condokirono) masih pada di Jakarta, insyaallah nanti tanggal 5 Oktober. Tanggal 4 Oktober baru ke Yogya, insyaallah semoga dimudahkan untuk ketemu tanggal 5 Oktober," sebutnya.

Baca juga: Surat soal Izin Muslim United Pakai Masjid Gedhe Viral, Ini Kata Keraton Yogya

Sebelum tabayun dengan pihak Keraton, kata Nanang, pihak panitia belum bisa menentukan sikap setelah tak diberi izin.

"Karena kami perlu klarifikasi juga dari mereka (pihak Keraton Yogyakarta) secara langsung, bagaimana, alasan-alasannya apa, pertimbangannya bagaimana. Kami mungkin bisa diskusi tarik ulurnya sampai sebatas mana," sambung Nanang.

Nanang menegaskan kegiatan *Muslim United* 2019 tak membawa misi atau agenda politik tertentu. Melalui ajang tersebut, pihaknya hanya ingin di antara umat Islam bisa berkumpul dalam sebuah kegiatan yang merekatkan umat.

"Tidak ada agenda politik, nggak ada agenda (tertentu). Ini *ngomongin* ukhuwah saja, jadi kita bersaudara. Islam kan berbeda-beda, ada mazhab ini, mazhab ini. Orang awam kadang-kadang menganggapnya itu permusuhan, padahal tidak," tutupnya. (ush/rih)

Jika Muslim United Tetap Gelar Acara di Masjid Gedhe, Sultan: Urusan Polisi

Usman Hadi - detikNews

Jumat, 11 Okt 2019 12:30 WIB



Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta. Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menegaskan pihaknya tidak memberikan izin penggunaan

Kagungan Ndalem (KgD) Masjid Gedhe Kauman untuk kegiatan *Muslim United* #2. Menurutnya jika acara itu tetap digelar di Masjid Gedhe menjadi urusan polisi.

"Itu kan urusan polisi, kalau saya hanya itu, ya kan. Ya asal aman dan sebagainya itu kan urusan polisi," ujar Sultan HB X kepada wartawan di Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (11/10/2019).

Sultan kembali menegaskan bahwa Keraton tak memberi izin kepada *Muslim United* yang rangkaian acaranya dimulai hari ini itu.

"Kita kan yang punya rumah, kan (Keraton) tidak mengizinkan," imbuhnya.

Diwawancara terpisah, Kabid Humas Polda DIY, Kombes Yuliyanto, memastikan hingga detik ini aparat kepolisian belum menerima surat pemberitahuan atau permohonan izin kegiatan *Muslim United* #2 di Masjid Gedhe Kauman.

"Sampai saat ini Polsek, Polresta, maupun Polda belum menerima surat pemberitahuan atau permohonan izin kegiatan tersebut," jelas Yuliyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, pagi tadi.

Yuliyanto mengatakan, polisi hanya bisa mengeluarkan izin kegiatan apabila pihak panitia mendapatkan restu menggunakan Masjid Gedhe Kauman dari Keraton. Sebab Keraton merupakan pemilik sah dari Masjid Gedhe tersebut.

"Polri ketika akan memberikan izin haruslah berdasarkan izin dari yang berwenang dengan penggunaan tempat acara. Dalam hal ini Polri belum menerima izin penggunaan tempat yang dikeluarkan oleh pihak Keraton," pungkas dia. **(ush/sip)**

***Muslim United* Tetap Digelar di Masjid Gedhe, Panitia: Diakomodir Takmir**

Usman Hadi - detikNews

Jumat, 11 Okt 2019 16:21 WIB



Panitia *Muslim United*, Tano Nazoeaggi. Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta - Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, tak memberikan izin penggunaan KgD Masjid Gedhe Kauman untuk kegiatan *Muslim United #2*. Pihak panitia menyampaikan bahwa acara ini diakomodir oleh takmir Masjid Gedhe Kauman.

"Saya no comment kalau itu (sikap Keraton), karena saya khususnya (menangani) bagian pameran," kata Ketua Bagian Pameran *Muslim United #2*, Tano Nazoeaggi, kepada wartawan di Kompleks Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta, Jumat (11/10/2019).

"Mungkin saya bisa jawab ini adalah acara seperti di headlinenya bahwa ini diselenggarakan oleh Forum Ukhuwah Islamiyyah, terus kemudian diakomodir sama takmir Masjid Gedhe Kauman dan Pam Budaya Yogya," sambungnya.

Saat ditanya terkait perizinan di kepolisian, Tano juga tak bersedia berkomentar. "Saya bukan ranahnya (menjawab), dan saya lebih memaksimalkan perekonomiannya," ungkapnya.

Rangkaian kegiatan *Muslim United #2* telah dimulai pada pagi tadi, namun baru secara resmi dibuka nanti malam. Ada sekitar 120 *tenant* yang berpartisipasi, dan sejumlah ustaz turut meramaikan acara tersebut.

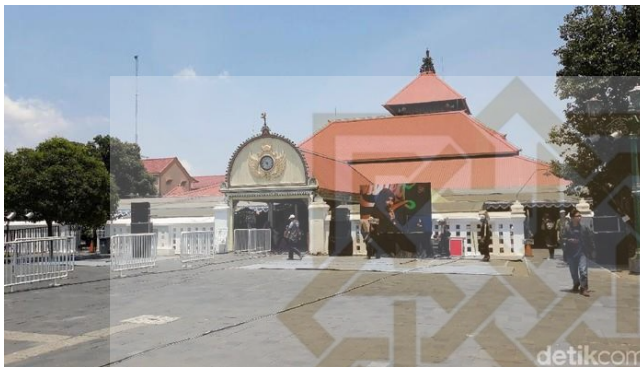
"Inshaallah, inshaallah (semua ustaz hadir)," tuturnya.

Detikcom sudah mencoba memintai konfirmasi Ketua Panitia *Muslim United #2*, Nanang Syaifurozi, untuk menanyakan perihal kelengkapan izin kegiatan. Namun hingga berita ini ditulis, Nanang tak bersedia berkomentar. **(ush/sip)**

Acara *Muslim United* di Masjid Gedhe Tak Berizin, Ini Penjelasan FUI

Usman Hadi - detikNews

Jumat, 11 Okt 2019 19:11 WIB



Masjid Gedhe Keraton Yogyakarta, Jumat (11/10/2019). Foto: Pradito Rida Pertama/detikcom

Yogyakarta - Kegiatan *Muslim United* #2: Sedulur Saklawase yang digelar di Masjid Gedhe Kauman tak mengantongi izin dari Keraton Yogyakarta selaku pemilik masjid dan dari aparat kepolisian. Meski begitu, acara itu tetap berjalan.

Presidium Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Syukri Fadholi, mengakui bahwa kegiatan di Masjid Gedhe belum mengantongi izin. FUI selaku penyelenggara kegiatan mencoba memberikan penjelasan.

"Jadi pada prinsipnya, bahwa pada mulanya panitia pelaksana *Muslim United* ini sudah mengajukan permohonan kepada Keraton, yang kemudian tanggal 5 (Oktober) diizinkan oleh Keraton," jelas Syukri, Jumat (11/10/2019).

Memang pihak Keraton melalui KGPH Hadiwinoto sempat mengeluarkan surat yang memperbolehkan panitia *Muslim United* menggunakan Alun-alun Utara sebagai tempat kegiatan. Namun surat itu akhirnya dicabut.

Syukri mengatakan, atas dasar surat yang sempat dikeluarkan KGPH Hadiwinoto itu akhirnya pihak panitia mempersiapkan segala hal. Ia mengklaim persiapan panitia sudah 80 persen sebelum akhirnya dilarang Keraton.

"Atas dasar izin itu (surat yang sempat dikeluarkan KGPH Hadiwinoto) kemudian panitia melakukan persiapan, sehingga sampai kepada 80 persen dipersiapkan. Kemudian memang ada penolakan dari Keraton kembali," katanya.

Ia menduga penolakan itu karena pihak Keraton menerima informasi yang salah. Sebab menurutnya banyak beredar informasi yang menyebutkan bahwa kegiatan *Muslim United* diisi oleh orang-orang berpaham radikal.

"Seolah dianggap bahwa (*Muslim United*) ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat radikal, kemudian antipemerintah. Saya menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan semacam itu tidak beralasan," sebutnya.

Meski tak direstui Keraton, Syukri menuturkan panitia pelaksana *Muslim United* tetap mencoba mengurus perizinan ke kepolisian. Namun izin kegiatan dari polisi hingga kini tak keluar, Syukri tak menampik itu.

Pihak panitia, kata Syukri, hingga kini tetap mencoba menjalin komunikasi dengan aparat. "Panpel (panitia pelaksana) masih dalam tahap pembicaraan untuk meminta supaya dipahami untuk tetap berjalan," tuturnya.

Tak hanya dengan aparat, Syukri menyebut pihak panitia hingga kini juga tetap mencoba menjalin komunikasi dengan pihak Keraton. Ia pun berharap pihak Keraton dan kepolisian memberikan kebijaksanaannya.

"Kita harapan, saya sebagai orang tua yang mengasuhi anak-anak ya berharap bahwa ini tetap bisa berjalan sampai dengan selesai," ucap mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta sekaligus Penasihat *Muslim United* #2 ini.

Diberitakan sebelumnya, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X, menegaskan pihaknya tidak memberikan izin penggunaan Kagungan Ndalem (KgD) Masjid Gedhe Kauman untuk kegiatan *Muslim United* #2.

"Kita kan yang punya rumah, kan (Keraton) tidak mengizinkan," kata Sultan HB X kepada wartawan di kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Jumat (11/10/2019).

Gubernur DIY ini enggan menanggapi acara *Muslim United* #2 di kompleks Masjid Gedhe Kauman lebih jauh. Ia pun menyerahkan pengamanan wilayah termasuk di Masjid Gedhe kepada kepolisian.

"Itu kan urusan polisi, kalau saya hanya itu, ya kan. Ya asal aman dan sebagainya itu kan urusan polisi," kata Sultan menanggapi kemungkinan apabila kegiatan *Muslim United* #2 tetap digelar.

(ush/rih)

Tak Diizinkan di Kauman, Acara *Muslim United* Dipindah ke Jogokariyan

Usman Hadi - detikNews

Sabtu, 12 Okt 2019 12:38 WIB



[43 komentar](#)

Kegiatan *Muslim United* di Masjid Gedhe Kauman, Yogya. -- Foto: Pradito Rida Pertama

Yogyakarta - Acara *Muslim United* #2 akhirnya dipindah ke Masjid Jogokariyan, Yogyakarta. Hal itu dilakukan karena pihak panitia tidak mendapatkan izin berkegiatan di Masjid Gedhe Keraton (Kauman) dari pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

"Iya, (acara *Muslim United* #2) insyaallah benar nanti jam 15.00 WIB pindah ke Jogokariyan," jelas Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Muhammad Jazir, saat dimintai konfirmasi wartawan, Sabtu (12/10/2019).

Jazir menjelaskan proses pemindahan acara *Muslim United* #2 dari Masjid Gedhe Keraton ke Jogokariyan. Menurutnya, keputusan ini diambil setelah pihak panitia berdialog dengan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri, Jumat (11/10/2019) malam.

"Kapolda mengatakan 'apakah (*Muslim United* #2) tetap akan jalan (di Masjid Gedhe Keraton), meskipun pemilik tempat tidak mengizinkan? Kalau polisi tidak akan mengambil tindakan karena *Ngarso Dalem* (Sultan HB X) tidak menginginkannya," tuturnya.

Dalam dialog itu, lanjut Jazir, Dofiri mengingatkan panitia untuk menjunjung tinggi akhlak. "*Ngarso Dalem* tidak menginginkan ada penindakan secara hukum. 'Ya akhlaknya saja bagaimana wong tidak diizinkan kok nekat'," ujar Jazir menirukan Dofiri.

Menurut Jazir, pihak panitia menerima argumentasi dari Dofiri. Oleh karenanya, pihak panitia memutuskan untuk memindahkan acara *Muslim United #2* termasuk tenda tenant ke Kompleks Masjid Jogokariyan, pemindahan dilakukan sore ini.

"Otomatis (semua tenda tenant di Masjid Gedhe Keraton dipindah), karena kan (di Kauman & tidak diberi izin oleh yang punya lahan. Ada beberapa alternatif, tetapi kelihatannya yang paling siap dari aspek tempat dan SDM-nya ya Jogokariyan," tuturnya.

Jazir menegaskan pemindahan acara *Muslim United #2* ke Masjid Jogokariyan tidak akan menjadi masalah. Sebab pihak Takmir Masjid Jogokariyan berpengalaman dalam mengurus acara dengan skala besar, misalnya dalam mengurus pasar Ramadan.

Disinggung mengenai izin polisi untuk kegiatan *Muslim United #2* di Masjid Jogokariyan, Jazir menyebut pihak panitia baru memberitahukan secara lisan. Namun ia meyakini polisi akan memaklumi keterlambatan dokumen perizinan.

"Ya saya kira polisi sudah tahu lah kenapa (acara *Muslim United #2* dipindah) ke Jogokariyan, kira-kira begitu. Meskipun secara lisan sudah disampaikan kemungkinan itu, tapi surat belum disampaikan karena (pemindahan acara) mendadak ya," tutupnya. (ush/mbr)